

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian beberapa bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian hukum ini dikemukakan analisis asas kepastian hukum terhadap pengaturan sertifikasi halal produk pangan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut:

1. Adanya UU JPH yang mengatur kewajiban sertifikasi halal produk pangan yang beredar di Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum kepada para konsumen terutama konsumen Muslim dalam mengkonsumsi produk pangan yang beredar di pasaran jika diukur dari lima syarat yang dikemukakan oleh *Jan M. Otto*, karena pada syarat kelima belum dapat dibuktikan sehubungan dengan baru sah diberlakukannya UU JPH ini pada tahun 2019. Namun peraturan perundang-undangan yang ada telah menentukan bagaimana proses mendapatkan sertifikat halal, hak dan kewajiban pelaku usaha mendaftarkan produk pangannya untuk mendapatkan sertifikat halal, pengawasan jalannya pemberlakuan sertifikat halal, peran serta masyarakat dalam sosialisasi dan pengawasan produk yang beredar dan sanksi bagi para produsen yang melanggar.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah peraturan yang menentukan apa yang menurut hukum

diperbolehkan dan dilarang dalam proses sertifikasi halal produk pangan yang beredar di Indonesia. UU JPH memberikan kepastian hukum bahwa pemerintah sudah membuat pengaturan yang wajib ditaati oleh para pelaku usaha dan juga keuntungan yang akan didapat oleh para konsumen, khususnya konsumen Muslim dalam mengkonsumsi produk pangan yang sudah bersertifikat halal.

2. Para pelaku UKM sebagai pelaku usaha tetap diwajibkan memiliki sertifikat halal terhadap produk pangan yang diproduksinya walaupun pada praktek di lapangan para pelaku UKM ini masih memiliki kesulitan, diantaranya adalah belum mengetahui dan paham mengenai pengaturan dalam UU JPH tersebut yang berdampak pada diabaikannya kewajiban sertifikasi halal pada produk pangannya. Hal ini menyebabkan penerapan asas kepastian hukum dalam pengaturan sertifikasi halal produk pangan para pelaku UKM sulit untuk dicapai.

5.2 Saran

Pemerintah diharapkan lebih gencar lagi untuk menyosialisasikan secara merata dan masif untuk memastikan masyarakat benar-benar tahu tentang konsekuensi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan juga perlu dibuat mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas terkait pelanggaran para pihak.

Pihak penyelenggara Jaminan Produk Halal perlu berkoordinasi dengan semua pihak terkait, diantaranya adalah Pemerintah, MUI, Kemenag, BPOM dan para

pelaku usaha juga masyarakat sebagai konsumen secara lebih intensif untuk melaksanakan UU JPH ini, selain itu juga sebaiknya Kemenag bekerja sama dengan Kementrian Koperasi dan UKM untuk pendataan secara lengkap jumlah pengusaha kecil, menengah dan Industri Rumah Tangga (IRT) di tingkat kabupaten/kota. Data tersebut akan berfungsi sebagai basis data pemerintah dalam penerapan UU JPH.

Kemenag disarankan menyiapkan regulasi keringanan persyaratan pengajuan dan mekanisme pembebasan biaya untuk seluruh proses penerbitan sertifikasi halal bagi UKM/IRT di seluruh Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Makassar: Kencana, 2007
- Aisyah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013
- Asri, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal, Kajian Hukum dan Keadilan*, 2016
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011
- Algra, N.E. dan Van Duyvendijk, K. , *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir dan diedit oleh Boerhanoeddin Soetan Batoeah, Bandung: Binacipta, 1983
- Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009.
- B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- C.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, 1969

Departemen Agama RI, Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMAS, Jakarta:Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Departemen Agama R.I, 2003.

Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

E. Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika, 2012.

I.H Hijimans, dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta,: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014

Lili Rasjidi & Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

- Lukmanul Hakim, *Labelisasi Halal sebagai Wujud Perlindungan Konsumen*, Makalah, Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2004
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Genta Press, 2007
- Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, Malang: Madani, 2009
- NHT Siahaan, *Hukum Konsumen – Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, LPPOM MUI, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit Intermedia, 2001.

Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*, Jakarta: Pirac, 2001

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Tim Pengkajian Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, *Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011

Yusuf Shofie, *21 Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hak Konsumen*, Jakarta: Pirac, 2003

Zainuddin Ali & Supriadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2014

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 382/MENKES/PER/VI/989 tentang Pendaftaran Makanan

JURNAL

A. Hamid S. Attamimi, “Aktualisasi Hukum Islam”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. V No. 13 Tahun 1994, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera

Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, Doddy Krisdasaksana, “Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18 Nomor 2, Desember 2016

J.M Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, dalam *Filsafat Hukum* Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008: “...when he says that an unjust law is not law in the focal sense of the term law [i.e.,simpliciter] notwithstanding that it is law in a secondary sense of that term [i.e.,secundum quid]”.

KN. Sofyan, “Cita Hukum (*rechtsidee*) dan Cita Negara (*staatsidee*) sebagai Landasan Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. VIII No. 2 Tahun 2010, Palembang: Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya

KN. Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014

Kurniawan Budi sutrisno Et All, “Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Penelitian Universitas Mataram*, Vol. 18, No. 1, (Februari 2014)

Ma’ruf Amin, “Mengapa Keharaman Babi Bersifat Mutlak”, *Jurnal Halal*, No. 99 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI

Paulus J. Rusli, “Nilai Unggul Produk Halal”, *Jurnal Halal* Nomor 59 Th X, (Jakarta:LPPOM MUI, 2005

“Penerapan UU JPH, Pelaku Usaha Diminta Pro Aktif Urus Sertifikasi Halal”
<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/10/21/103090/penerapan-uu-jph-pelaku-usaha-diminta-pro-aktif> (diakses pada 31 juli 2018, pada jam 1.52 WIB)

Ramlan & Nahrowi, “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim”, (*Ahkam*: Vol.XIV, No. 1, Januari 2014)

Rudolf Stamler dalam Roeslan Saleh, “Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional”, *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 Tahun 1995, Jakarta:BPHN, Depkeh

Sjarif Hasan, “Pemerintah Dorong Sertifikasi Halal UKM”, *Jurnal Halal*, No.91 Th.XIV Tahun 2011, Jakarta:LPPOM MUI

Susilowati Suparto, Djanurdi, Deviana Yuanitasari, dan Agus Suwandono, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal

Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia”, *MIMBAR HUKUM*
Vol. 28 No. 3 Oktober 2016

Syafrida, “Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi
Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, *ADIL:*
Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2

INTERNET

“2018, Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 285 Juta Jiwa”
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia> (diakses pada 23 juli 2018, pada jam 16.21 WIB)

“Apa itu Makanan Halal..?”, dalam www.zona-sosial.blogspot.com, (diakses pada
22 Maret 2018, pada jam 19.02 WIB)

Apriyantono, “Penentuan Kehalalan Produk Pangan Hasil Bioteknologi: Suatu
Tantangan”, dalam www.indohalal.com, (diunduh 1 April 2018 pada jam
14.55 WIB)

“BPJPH Upayakan Biaya Sertifikat Halal UMKM Hanya 10 Persen”
https://republika.co.id/amp_version/patuyo313 (diakses 22 juli 2018, pada
jam 23.12 WIB)

Fokky, “Perlindungan Konsumen Pangan dalam Perspektif Islam”, dalam
www.uai.ac.id. (diunduh 5 April 2018, pada jam 14.13 WIB)
<http://dhitanh1510.blogspot.co.id/2016/05/labelisasi-dan-sertifikasi-halal.html?m=1> (diakses pada 13 april 2018, pada jam 00.32 WIB)

<http://googleweblight.com/i?u=http://forbil.org/id/artcle/143/sertifikasi-halal-oleh-majelis-ulama-indonesia-mui-dan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-bpjph-siapa-yang-berwenang&hl=en-ID> (diakses pada 5 April 2018, pada jam 22.35 WIB)

<http://www.lisubisnis/2016/12/perkembangan-jumlah-umkm-di-indonesia.html?m=1> (diakses 31 juli 2018, pada jam 23.53 WIB)

<https://produkhalalpringsewu.blogspot.co.id/2017/07/kriteria-produk-halal-ayo-ke-halal.html?m=1> (diakses 17 Februari, pada jam 22.10 WIB)

http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/1227/8/Liha1/120 (diakses 10 Mei 2018, pada jam 21.25 WIB)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-merupakan-hukum-positif-mengikat> (diakses 20 Mei 2018, pada jam 19.58)

“Ikhsan: UU JPH Terhambat Tarik-menarik Kepentingan”
www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp_version/p5zina396
(diakses pada 22 juli 2018, pada jam 14.21 WIB)

“Industri Makanan Bersertifikat Halal Masih Minim di Jabar”,
https://www.google.com/amp/m.republika.co.id/amp_version/owlwa1384
(diakses 7 Maret 2018, pada jam 21.15 WIB)

Indonesia Investments, “Penduduk Indonesia”, <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>, (diakses 19 September 2017 pada jam 17.30 WIB)

“Ketua MUI Medan: Baru 200 UMKM yang Sudak Miliki Sertifikat Halal”,
<http://www.gomuslim.co.id/read/news/2017/07/19/4722/ketua-mui->

[medan-baru-200-umkm-yang-sudah-miliki-sertifikat-halal.html](https://www.medan-baru-200-umkm-yang-sudah-miliki-sertifikat-halal.html) (diakses 22 juli 2018, pada jam 01.30 WIB)

“Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tembus Lebih Dari 60 Persen”,
<https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen>,
 (diakses 10 Maret 2018, pada jam 19.10 WIB)

“LPPOM MUI Klaim Pengurusan Sertifikasi Halal UMKM Mudah”
m.republika.co.id/pengajuan+sertifikasi+halal+ukm, (diakses pada 20 juli 2018,
 pada jam 14.23 WIB)

“Memahami Kepastian (Dalam) Hukum
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> (diakses 20 juli 2018, pada jam 16.35 WIB)

Moh. Anas Muchtar, “Pentingnya Sertifikasi Halal Melalui LPPOM-MUI”, dalam
www.madinatulalim.com. diakses pada 22 Maret 2018, pada jam 19.53
 WIB)

“MUI Terbitkan 400 Sertifikat Halal Produk UMKM”,
<https://legaleraindonesia.com/mui-terbitkan-400-sertifikat-halal-produk-umkm/> (diakses 22 juli 2018, pada jam 22.52 WIB)

“Penerapan UU Jaminan Produk Halal, UMKM Harus Bangkit”
<https://bisnisukm.com/penerapan-uu-jaminan-produk-halal-umkm-harus-bangkit.html> (diakses pada 31 juli 2018, pada jam 2.38 WIB)

“Perlu Aturan yang Wajibkan Pengusaha Cantumkan Label Halal”, dalam
www.jurnal-ekonomi.org, (diunduh 2 April 2018, pada jam 09.45 WIB)

“Permasalahan Utama Sertifikasi Halal bagi UKM”,

<http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/nora-tiga-permasalahan-utama-sertifikasi-halal-bagi-ukm-pangan-di-kalimantan-barat-> (diakses 28 Februari 2018, pada jam 15.22 WIB)

“Potensi Besar UKM Industri Makanan-Minuman”, [http://presidenri.go.id/berita-](http://presidenri.go.id/berita-aktual/potensi-besar-ukm-industri-makanan-minuman.html)

[aktual/potensi-besar-ukm-industri-makanan-minuman.html](http://presidenri.go.id/berita-aktual/potensi-besar-ukm-industri-makanan-minuman.html) (diakses 10 Maret 2018, pada jam 20.47 WIB)

“Sektor Makanan di Jateng Didorong Bersertifikat Halal”,

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/06/060000326/sector-makanan-di-jateng-didorong-bersertifikat-halal>, (diakses 22 juli 2018, pada jam 23.45 WIB)

“Top 10 Populasi Umat Muslim Terbesar di Dunia”

https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim-Terbesar-di-Dunia?mobile_site=true (diakses pada 23 juli 2018, pada jam 17.03 WIB)

“UNS dan BPJPH Kemenag RI Upayakan Peningkatan Kualitas Jaminan Produk

Halal Bagi Masyarakat” <https://uns.ac.id/id/uns-update/uns-dan-bpjph-kemenag-ri-upayakan-peningkatan-kualitas-jaminan-produk-halal-bagi-masyarakat.html> (diakses pada 24 juli 2018, pada jam 15.45 WIB)

“Urgensi Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal”

<http://m.hukumonline.com/talks/baca/lt559342c89140d/urgensi-pemberlakuan-undang-undang-jaminan-produk-halal> (diakses pada 31 juli 2018, pada jam 2.02 WIB)